

Hubungan Suprastruktur, Infrastruktur Pendidikan Terhadap Polisosbud

Doni Susrianto¹⁾, As'ad As'ad²⁾, Jamrizal³⁾

Email: donisusrianto071183@gmail.com¹⁾

¹⁾ UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Indonesia

Abstract

The Unitary State of the Republic of Indonesia is a country rich in natural and cultural resources, stretching from Sabang to Merauke with national borders. The aim of the research is to find out the state of Polisosbud, superstructure and infrastructure of Islamic education and the influence of the development of Polisosbud on Islamic education. The research method uses a qualitative approach and observation techniques, interviews and documentation. The results of the study show that with the development of Polisosbud 2021, the cultural development index can provide a more comprehensive picture, covering 7 dimensions, namely cultural economy, education, socio-cultural resilience, cultural heritage, cultural expression, literacy culture and gender equality. Polisosbud superstructure and educational infrastructure are 3 things that are closely related and influence each other, meaning that education contains elements of Polisosbud. Polisosbud activities related to educational aspects. Polisosbud influences educational resources in the form of teacher salaries, learning support infrastructure and training. One of the most important contributions in the formation of meaningful learning is the presence of professional teachers.

Keywords: *Infrastructure, Superstructure, Polisosbud*

Abstrak

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam dan budaya, terbentang dari Sabang sampai Merauke dengan batas negara. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui keadaan Polisosbud, suprastruktur dan infrastruktur pendidikan Islam serta pengaruh perkembangan Polisosbud terhadap pendidikan Islam. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil kajian menunjukkan bahwa dengan berkembangnya Polisosbud 2021, indeks perkembangan budaya dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif, meliputi 7 dimensi yaitu ekonomi budaya, pendidikan, ketahanan sosial budaya, warisan budaya, ekspresi budaya, budaya literasi dan kesetaraan gender. Suprastruktur Polisosbud dan infrastruktur pendidikan merupakan 3 hal yang berkaitan erat dan saling mempengaruhi, artinya pendidikan mengandung unsur Polisosbud. Kegiatan Polisosbud berkaitan dengan aspek pendidikan. Polisosbud mempengaruhi sumber daya pendidikan berupa gaji guru, infrastruktur penunjang pembelajaran dan pelatihan. Kontribusinya yang salah satu hal terpenting dalam pembentukan pembelajaran bermakna adalah kehadiran guru yang profesional.

Kata Kunci: *Infrastruktur, Suprastruktur, Polesosbud*

Cara Mensitasi Artikel:(APA 6)

Susrianto, D., As'ad, A., & Jamrizal, J. (2023). Hubungan suprastruktur, infrastuktur pendidikan terhadap polisosbud. *Al-Liqo: Jurnal Pendidikan Islam*, 8(1), 1-19. <https://doi.org/10.46963/alliqo.v8i1.1121>

*Corresponding Author:

alithamrin88@gmail.com

Editorial Address: Kampus Parit Enam, STAI Auliaurasyidin Tembilahan. Jl. Gerilya No. 12 Tembilahan Barat, Riau Indonesia 29213.

Histori Artikel:

Diterima : 28/06/2023

Direvisi : -

Diterbitkan : 30/06/2023

DOI: <https://doi.org/10.46963/alliqo.v8i1.1121>



This Work is Licensed under (CC-BY-SA)

PENDAHULUAN

Menurut Tripuranto (2011), Indonesia berbatasan langsung di daratan dengan tiga Negara yaitu Malaysia, Papua New Guinea dan Timor Leste. Sedangkan di wilayah laut dengan sepuluh Negara yaitu India, Thailand, Malaysia, Singapura, Vietnam, Philipina, Papua New guinea, Australia, dan Timor Leste. Sedangkan di wilayah laut dengan sepuluh Negara yaitu India, Thailand, Malaysia, Singapura, Vietnam, Philipina, Papua New guinea, Australia, dan Timor Leste. Salah satunya yaitu keterbatasan infrastruktur pendidikan di daerah-daerah terdepan Republik Indonesia. Infrastruktur memegang peranan penting sebagai salah satu roda penggerak pembangunan dan pertumbuhan ekonomi.

Adapun beberapa penelitian relevan dalam pembahasan ini yaitu karangan Jhon Eka Powa, As'ad, dan Jamrizal yang berjudul "Pengaruh Perkembangan POLESBUD terhadap penataan suprastruktur dan Infrastruktur Pendidikan" yang termuat dalam *journal of social Science Research*. Penelitian yang ditulis oleh Suyanto, Lias Hasibuan, Kasful Anwar Us yang berjudul "Konsep Dasar Ekonomi Pendidikan Pada Tataran Suprastruktur dan Infrastruktur Politik di Indonesia. Penulis Soemardi dan Reini D dengan judul *Pembangunan Infrastruktur Untuk Semua*. RJ Kodoatie menulis tentang *Pengantar Manajemen Infrastruktur*.

Dewasa ini, proses pendidikan belum berjalan sebagaimana mestinya, salah satu penyebabnya adalah sistem Pendidikan yang dianggap belum mampu menjawab kebutuhan zaman (Basir & Ramadan, 2017). Pendidikan mempunyai peranan vital dan strategis dalam pembangunan bangsa serta memberikan sumbangsih yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi. Berbagai fasilitas fisik merupakan hal yang vital guna mendukung berbagai kegiatan pemerintahan, perekonomian, industri dan kegiatan sosial di masyarakat dan pemerintahan (Soemardi dan Reini D, 2009).

Infrastruktur adalah fasilitas-fasilitas fisik yang dikembangkan atau dibutuhkan oleh agen-agen publik untuk fungsi-fungsi pemerintahan dalam penyediaan air, tenaga listrik, pembangunan limbah, transportasi dan pelayanan-pelayanan similar untuk memfasilitasi tujuan-tujuan sosial dan ekonomi

(Kodoatie, R.J., 2005). Sedangkan menurut (Sadono, 2011) infrastruktur merupakan komponen utama dalam mengembangkan kegiatan ekonomi dan meningkatkan efisiensi kegiatan ekonomi suatu negara. Infrastruktur dalam meningkatkan efisiensi kegiatan ekonomi ini berupa jalan raya, pelabuhan laut, lapangan terbang, kawasan industri, alat-alat perhubungan seperti telepon dan alat pengangkutan, dan fasilitas penyediaan air dan listrik. Selanjutnya, infrastruktur finansial yang meliputi kerja sama perbankan, pos, dan pajak dari suatu populasi yang mewakili kinerja finansial Negara.

METODE

Kajian ini menggunakan paradigma kualitatif dan kepustakaan yang mengandalkan bibliografi dari berbagai sumber seperti buku dan artikel ilmiah yang dianggap relevan dengan tajuk pembahasan. Teknik pengambilan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data menggunakan pendekatan integratif dan analisis isi difungsikan untuk membaca makna yang substantif, Kemudian melakukan analisis deskriptif data yang dipaparkan secara detail.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Suprastuktur dan Infrastruktur terhadap politik Pendidikan

a. Partai

Pengertian partai dalam KBBI adalah kumpulan (sekelompok manusia) Merupakan seide, sehaluan, dan semaksud (utamanya di bidang politik). Partai ialah pencerminan dari negara yang demokrasi yang diteguhi sebagai keharusan bagi kehidupan modern. Jika Partai dimaksud mau menunjukkan sebagai penyebar keinginan rakyat kepada penguasa, maka tidak ada jalan lain harus hindari dari sikap yang mana dan oleh siapa.

b. Partai politik

1) Pengertian Partai Politik

Menurut UU ini, partai politik adalah sebuah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk

memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Menurut Sigmund Neumann, pengertian partai politik adalah organisation dari aktivis-aktivis politik yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintahan serta merebut dukungan rakyat melalui persaingan dengan golongan lain yang memiliki pandangan berbeda.

Partai politik pertama lahir di negara-negara Eropa Barat. Dengan meluasnya gagasan bahwa rakyat merupakan faktor yang perlu diperhitungkan serta diikutsertakan dalam proses politik, maka partai-partai politik telah lahir secara spontan dan berkembang menjadi penghubung antara rakyat dan pemerintah. (Bambang Sunggono, 1996)

Partai politik terlahir untuk mewujudkan suatu gagasan bahwa rakyat merupakan faktor yang perlu diikutsertakan dalam proses politik. Melalui partai politik inilah rakyat turut berpartisipasi dalam hal memperjuangkan dan menyalurkan aspirasi-aspirasinya atau kepentingan-kepentingannya. Dengan demikian, proses artikulasi kepentingan tersalurkan melalui partai politik. Berangkat dari anggapan bahwa dengan membentuk wadah organisasi partai politik bisa menyatukan orang-orang yang mempunyai pikiran serupa sehingga pikiran dan orientasi mereka bisa dikonsolidasikan. Dengan begitu pengaruh mereka bisa lebih besar dalam pembuatan dan pelaksanaan keputusan. (Budiarjo Miriam, 2008).

Jadi Sebagai lembaga penyalur kepentingan rakyat, partai politik dijadikan komunikasi yang berfungsi dua arah, yaitu dari atas ke bawah dan juga dari bawah ke atas, Jika hal itu dapat terlaksana dengan baik, maka fungsi partai politik sebagai sosialisasi politik, partisipasi politik, artikulasi kepentingan, agregasi kepentingan, serta pembuatan kebijakan dapat berjalan dengan baik sehingga politik pembangunan yang diharapkan dapat terwujud.

2) Peran Partai Politik

a) Komunikator Politik

Komunikasi politik, komunikator politik merupakan salah satu faktor yang menentukan efektivitas komunikasi. Beberapa studi mengidentifikasi sejumlah karakteristik yang mempengaruhi kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain. Komunikator politik di sini adalah orang yang secara tetap dan berkesinambungan melakukan komunikasi politik.

Sosiolog J.D Halloran, seorang pengamat komunikasi massa, dalam bukunya Abdullah Hasyim berpendapat bahwa komunikator politik memainkan peran sosial yang utama, terutama dalam proses pembentukan suatu opini publik. Salah satu teori opini publik yang seluruhnya dibangun di sekitar komunikator politik, yaitu teori pelopor mengenai opini publik. Dalam hal ini menegaskan bahwa pemimpin menciptakan opini publik karena mereka berhasil membuat beberapa gagasan yang mula-mula ditolak, kemudian dipertimbangkan, dan akhirnya diterima.

b) Negosiasi Politik

Menurut Stephen Robbins dalam bukunya “Organizational Behavior”, negosiasi adalah proses pertukaran barang atau jasa antara dua pihak atau lebih, dan masing-masing pihak berupaya untuk menyepakati tingkat harga yang sesuai untuk proses pertukaran tersebut. Dalam buku *Teach Yourself Negotiating*, karangan Phil Baguley, dijelaskan juga tentang definisi negosiasi yaitu suatu cara untuk menetapkan keputusan yang dapat disepakati dan diterima oleh dua pihak dan menyetujui apa dan bagaimana tindakan yang akan dilakukan di masa mendatang. Negosiasi adalah cara yang paling efektif untuk mengatasi dan menyelesaikan konflik atau perbedaan kepentingan.

Beberapa pendapat menyebutkan bahwa negosiasi berkaitan dengan kemampuan komunikasi dari seseorang sehingga menurut

Wahab (1997) negosiasi adalah : alat dasar untuk memperoleh hal yang di kehendaki dari pihak lain. Sehingga dapat definisikan sebagai: “Komunikasi timbal balik yang dirancang untuk mencapai persetujuan ketika terdapat dua pihak dengan kepentingan bersama, dan salah pihak ada unsur yang menentang”

c) Lobby Politik

Lobi adalah aktivitas komunikasi yang dilakukan individu ataupun kelompok dengan tujuan mempengaruhi pimpinan 26 organisasi lain maupun orang yang memiliki kedudukan penting dalam organisasi dan pemerintahan sehingga dapat memberikan keuntungan untuk diri sendiri ataupun organisasi dan perusahaan pelobi. Pengertian lobi menurut AB Susanto (dalam Redi Panuju, 2010 ; 18) adalah : “Melobi pada dasarnya merupakan usaha yang dilaksanakan untuk mempengaruhi pihak-pihak yang menjadi sasaran agar terbentuk sudut pandang positif terhadap topik pelobi, dengan demikian diharapkan memberikan dampak positif bagi pencapaian tujuan. Kegiatan melobi bisa jadi sama pentingnya dengan pengembangan kompetensi profesional”

Dalam dunia politik istilah “pelobian” adalah merupakan usaha individu atau kelompok dalam kerangka berpartisipasi politik, untuk menghubungi para pemimpin politik atau pejabat pemerintah dengan tujuan mempengaruhi keputusan pada suatu masalah yang dapat menguntungkan sekelompok orang.

d) Mediator Politik

Mediasi merupakan sebuah proses di mana pihak-pihak yang bertikai, dengan bantuan dari seorang praktisi resolusi pertikaian (mediator) mengidentifikasi isu-isu yang dipersengketakan mengembangkan opsi-opsi, mempertimbangkan alternatif-alternatif dan upaya untuk mencapai sebuah kesepakatan. Dalam hal ini sang mediator tidak memiliki peran menentukan dalam kaitannya dengan 30 isi/materi persengketaan atau hasil dari resolusi persengketaan

tersebut, tetapi ia (mediator) dapat memberi saran atau menentukan sebuah proses mediasi untuk mengupayakan sebuah resolusi/penyelesaian).

Garry Goopaster memberikan definisi mediasi sebagai proses negosiasi pemecahan masalah di mana pihak luar yang tidak memihak (imparsial) bekerja sama dengan pihak-pihak yang bersengketa untuk membantu mereka memperoleh kesepakatan perjanjian yang memuaskan.

Goopaster mencoba mengeksplorasi lebih jauh makna mediasi tidak hanya dalam pengertian bahasa, tetapi ia juga menggambarkan proses kegiatan mediasi, kedudukan dan peran pihak ketiga, serta tujuan dilakukannya suatu mediasi.

Goopaster jelas menekankan, bahwa mediasi adalah proses negosiasi, di mana pihak ketiga melakukan dialog dengan pihak bersengketa dan mencoba mencari kemungkinan penyelesaian sengketa tersebut. Keberadaan pihak ketiga ditujukan untuk membantu pihak bersengketa mencari jalan pemecahannya, sehingga menuju perjanjian atau kesepakatan yang memuaskan kedua belah pihak. Jadi, secara singkat bisa digambarkan bahwa mediasi merupakan suatu proses penyelesaian pihak-pihak yang bertikai untuk mencapai penyelesaian yang memuaskan melalui pihak ketiga yang netral (mediator).

2. Suprastruktur dan Infrastruktur terhadap Ekonomi Pendidikan

Ekonomi Pendidikan membicarakan bagaimana manusia dan masyarakat memilih menggunakan uang guna menghasilkan berbagai jenis pelatihan, pengembangan pengetahuan, keterampilan, daya pikir, karakter dan lain-lain.

Ekonomi Pendidikan Ekonomi pendidikan merupakan konsep dalam bidang pendidikan untuk mengembangkan pendidikan yang berbasis ekonomi, baik itu berupa biaya Pendidikan, tujuan pendidikan yang menghasilkan ekonomi (Bangun kinerja enterprener).

Ekonomi pendidikan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana manusia dan masyarakat memilih menggunakan uang atau tidak untuk memanfaatkan sumber daya produktif yang langka guna menghasilkan bermacam jenis pelatihan dan pengembangan pengetahuan, keterampilan, daya pikir, karakter dan lain- lain khususnya melalui pendidikan ekonomi. Ekonomi pendidikan merupakan konsep dalam bidang pendidikan untuk mengembangkan pendidikan yang berbasis ekonomi, baik itu berupa biaya pendidikan maupun tujuan dari pendidikan itu sendiri bisa menghasilkan ekonomi. Semua akan terwujud bila suprastruktur dan infrastruktur saling mendukung.

Dalam bidang suprastruktur sistem politik di Indonesia meliputi legislatif, eksekutif dan Yudikatif. Sedangkan infrastruktur yaitu Partai politik, kelompok penekan, kelompok berkepentingan dan media komunikasi politik yang bertindak mengawasi dan memberikan masukan yang konstruktif. Bersatunya kedua komponen tadi akan dapat mewujudkan pengembangan ekonomi pendidikan yang efektif dan efisien.

Bidang Suprastruktur dan Infrastruktur Politik Pendidikan meliputi Eksekutif, Yudikatif.

Sistem politik adalah suatu perangkat yang bertujuan untuk menjalankan roda pemerintahan di suatu negara. Dari sistem politik ini terdapat fungsi-fungsi yang dapat dirasakan oleh masyarakat, yaitu salah satunya untuk membuat kebijakan yang mengikat. Sistem politik ini memiliki *output* berupa kebijakan-kebijakan negara yang mengikat seluruh warganya. Contohnya seperti aspirasi masyarakat akan dirumuskan dan dilaksanakan melalui kebijakan negara.

Sistem politik di Indonesia terbagi atas dua komponen, yaitu suprastruktur dan infrastruktur politik. Suprastruktur politik adalah lembaga negara yang tertera di dalam konstitusi negara dan menjalankan fungsi sebagai legislatif, yudikatif, dan eksekutif. *“Sistem politik adalah suatu perangkat yang bertujuan untuk menjalankan roda pemerintahan di suatu negara. “Tugas dari lembaga tersebut adalah membuat keputusan yang berkaitan dengan kepentingan umum. Sedangkan, infrastruktur politik adalah kelompok*

kekuatan politik yang bergerak di masyarakat dan berperan aktif. Kelompok ini menjadi pelaku politik non formal yang memiliki pengaruh dalam pembentukan kebijakan suatu negara. Peran dan tugas infrastruktur politik diatur dalam konstitusi dan perundang-undangan negara.

Lembaga Suprastruktur Politik

1) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dipilih dari setiap provinsi melalui pemilihan umum. Hak DPR adalah mengajukan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah dan daerah itu sendiri.

2) Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)

Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR adalah lembaga yang bertugas mengubah dan menetapkan UUD serta melantik presiden dan wakil presiden. Tugas lainnya yaitu memutuskan usulan DPR berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk memberhentikan presiden dan atau wakil presiden. ***“Tugas dari suprastruktur politik yaitu membuat keputusan yang berkaitan dengan kepentingan umum.”***

3) Presiden dan Wakil Presiden

Presiden adalah pemegang kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Dalam menjalankan tugasnya, presiden dibantu wakil presiden.

4) Mahkamah Konstitusi (MK)

Mahkamah Konstitusi adalah lembaga negara yang memiliki kewenangan untuk menghadiri di tingkat pertama dan terakhir UU terhadap UUD. Selain itu, MK juga berwenang untuk membubarkan partai politik dan memutus hasil perselisihan tentang pemilu.

5) Mahkamah Agung (MA)

Lembaga negara yang memegang kekuasaan kehakiman selain MK di Indonesia.

6) Komisi Yudikatif (KY)

Lembaga yang berwenang untuk mengusulkan pengangkatan seorang hakim agung serta menjaga dan menegakkan kehormatan martabat

hakim. “*Lembaga suprastruktur politik terdiri atas MPR, DPR, presiden dan wakil presiden, MK, KY, dan MA.*”

Lembaga Infrastruktur Politik

1) Pantai Politik

Partai politik merupakan organisasi yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan cita-cita dan kehendak.

2) *Interest Group*

Interest group adalah kelompok yang mempunyai kepentingan dalam kebijakan politik. Contohnya seperti serikat buruh, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan lain sebagainya.

3) *Pressure Group*

Pressure group adalah Kelompok yang memiliki tujuan untuk memperjuangkan keputusan politik berupa kebijakan publik atau UU yang dikeluarkan pemerintah. Hal ini mereka lakukan agar peraturan dan kebijakan yang dibuat sesuai dengan keinginan kelompok mereka.

4) Media Komunikasi Politik

Merupakan sarana komunikasi politik dalam proses penyampaian informasi dan pendapat politik secara tidak langsung kepada masyarakat. Tujuan dari adanya media komunikasi politik yaitu untuk mengolah, mengedarkan, mencari, dan menggiring aspirasi masyarakat.

a. Sedangkan Infrastruktur yaitu Partai Politik, Kelompok Penekan, Kelompok Kepentingan dan Media Komunikasi yang bertindak mengawasi

Struktur suatu negara dapat dibedakan menjadi dua yakni suprastruktur politik dan infrastruktur politik. Keduanya memiliki perbedaan yang sangat jelas, tetapi keduanya juga memiliki fungsi yang sama pentingnya. Suprakstruktur dan infrastruktur politik memiliki keterkaitan dan keterikatan satu sama lain. Suprastruktur mampu mengatur segala hal dalam infrastruktur demi tercapainya tujuan

infrastruktur politik itu sendiri. Demikian pula sebaliknya, infrastruktur mampu memengaruhi berjalannya suprastruktur.

Suprastruktur Politik Suprastruktur politik adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan alat kelengkapan negara. Alat kelengkapan negara tersebut mencakup kedudukan, kekuasaan, wewenang, tugas-tugas pembentukan dan keterkaitan antar seluruh kelengkapan negara tersebut.

Presiden dan Wakil Presiden adalah pemegang kekuasaan tertinggi. Presiden dan Wakil Presiden memiliki kekuasaan untuk memerintah, tetapi dibatasi oleh undang-undang sehingga menghindari penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang. Pada hakikatnya, Presiden dan Wakil Presiden bertugas dan berwenang untuk menjalankan undang-undang yang sebelumnya telah dirumuskan oleh DPR.

Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) MPR adalah lembaga negara yang membuat dan menetapkan Undang-Undang Dasar (UUD) yang berorientasi kepada kepentingan rakyat, serta mengawasi jalannya lembaga eksekutif, dalam hal ini Presiden dan Wakil Presiden. Anggotanya terdiri dari anggota DPR dan DPD.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) DPR adalah lembaga yang menjalankan fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. DPR sebagai legislator yang merancang undang-undang demi kepentingan rakyat. Pada hakikatnya DPR adalah perwakilan yang dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilu.

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Anggota DPD dipilih secara langsung oleh rakyat, tetapi DPD menerapkan sistem perwakilan daerah, yang tujuannya mempertahankan representasi daerah di tingkat pusat. Seluruh anggota DPD bersifat independen.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) BPK dalam struktur lembaga negara sifatnya sebagai pelengkap (auxiliary) dari fungsi pengawasan terhadap kinerja pemerintah, khususnya pengawasan di bidang keuangan.

Mahkamah Agung (MA) MA adalah lembaga puncak atas kekuasaan kehakiman dalam lingkup peradilan umum, peradilan agama, peradilan tata usaha negara, dan peradilan militer. MA memiliki wewenang menguji peraturan undang-undang di bawah undang-undang terhadap undang-undang.

Mahkamah Konstitusi (MK) MK adalah lembaga yang menjamin penegakan konstitusi sebagai hukum tertinggi sehingga dapat berjalan sebagaimana mestinya. MK memiliki wewenang menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar.

Komisi Yudisial (KY) Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 hasil amandemen menyatakan bahwa KY bersifat mandiri. Lembaga atau badan negara yang memiliki kewenangan independen. KY memiliki wewenang mengusulkan pengangkatan Hakim Agung, menetapkan kode etik dan pedoman perilaku hakim, serta menjaga kehormatan dan martabat hakim.

Infrastruktur Politik Infrastruktur politik adalah segala sesuatu di luar alat kelengkapan negara secara formal, tetapi tetap memberikan pengaruh dan andil terhadap kebijakan. Kelompok yang digolongkan sebagai infrastruktur politik adalah partai politik, kelompok kepentingan, kelompok penekan, dan media.

Partai Politik Keberadaan partai politik tidak dapat dipisahkan dari masyarakat modern. Keberadaan parpol dibutuhkan sebagai organisasi penyalur aspirasi dan partisipasi masyarakat sekaligus suara untuk mewakili kepentingan rakyat. Kelompok Kepentingan adalah sekumpulan orang yang mengadakan persekutuan atau kerja sama berdasarkan kesamaan kepentingan, tujuan, dan keinginan yang sama.

Kelompok kepentingan dapat berupa kepentingan umum atau masyarakat secara luas atau kepentingan kelompok tertentu. Bentuk kerja sama yang dibangun adalah untuk memengaruhi kebijakan demi tercapainya tujuan awal. Kelompok Penekan adalah sekelompok orang dengan tujuan sama yang bergabung untuk melakukan aktivitas

penekanan terhadap pemerintah agar keinginan atau tujuan awalnya tercapai.

Kelompok penekan melakukan cara yang dianggap lebih efektif dari pada kelompok kepentingan, sering kali menjurus ke arah anarkis. Media massa berperan sebagai sarana komunikasi dari masyarakat kepada pemerintah dan begitu pula sebaliknya. Kebebasan pers mendukung peran media sebagai sumber informasi, pendidikan politik, sekaligus pengawas jalannya pemerintahan.

- b. Kedua komponen tadi diharapkan dapat mewujudkan pengembangan ekonomi pendidikan yang efektif dan efisien.

Ekonomi pendidikan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana manusia dan masyarakat memilih menggunakan uang atau tidak untuk memanfaatkan sumber daya produktif yang langka guna menghasilkan bermacam jenis pelatihan dan pengembangan pengetahuan, keterampilan, daya pikir, karakter dan lain-lain khususnya melalui pendidikan ekonomi.

Ekonomi pendidikan merupakan konsep dalam bidang pendidikan untuk mengembangkan pendidikan yang berbasis ekonomi, baik itu berupa biaya pendidikan maupun tujuan dari pendidikan itu sendiri bisa menghasilkan ekonomi. Semua akan terwujud bila suprastruktur dan infrastruktur saling mendukung. Dalam bidang suprastruktur sistem politik di Indonesia meliputi legislatif, eksekutif dan Yudikatif.

Sedangkan infrastruktur yaitu partai politik, kelompok penekan, kelompok berkepentingan dan media komunikasi politik yang bertindak mengawasi dan memberikan masukan yang konstruktif. Bersatunya kedua komponen tadi akan dapat mewujudkan pengembangan ekonomi pendidikan yang efektif dan efisien.

Pada Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab I Ketentuan Umum pasal 1 ayat 23 yang menjelaskan bahwa Sumber daya pendidikan adalah segala sesuatu yang dipergunakan dalam penyelenggaraan pendidikan yang meliputi tenaga kependidikan, masyarakat, dana, sarana, dan prasarana. Dalam hal ini

pembiayaan pendidikan merupakan suatu hal yang sangat penting bagi pendidikan di daerah.

Lebih lanjut dalam pasal 47 disebutkan tentang sumber pendanaan pendidikan yaitu; sumber pendanaan pendidikan ditentukan berdasarkan prinsip keadilan, kecukupan, dan keberlanjutan; pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat mengerahkan sumber daya yang ada sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; ketentuan mengenai sumber pendanaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Menurut (Ramayulis, 2006:6) Pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan bagi dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Sebuah proses pendidikan dapat dilaksanakan baik melalui lembaga pendidikan informal maupun formal.

Pendidikan dapat menjadikan sumber daya manusia lebih cepat mengerti dan siap dalam menghadapi perubahan dan pembangunan suatu Negara. Dengan demikian Sistem pendidikan bisa dipahami sebagai himpunan gagasan atau prinsip-prinsip pendidikan yang saling bertautan yang tergabung menjadi suatu keseluruhan.

Amanat Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 ayat 4 juga menerangkan dalam hal pembiayaan pendidikan bahwa; "Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional". Dalam implementasi kebijakan pendidikan di daerah akan berjalan dengan apabila didukung oleh sumber daya pendidikan (pembiayaan pendidikan) yang memadai dan dapat diandalkan untuk meningkatkan mutu dan kualitas sumber daya di

daerah. Dengan adanya perubahan kewenangan pengelolaan pendidikan dengan segera mengubah pola pembiayaan sektor pendidikan.

Pendidikan memiliki peran penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam upaya menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas. Pendidikan merupakan suatu faktor kebutuhan dasar untuk setiap manusia sehingga upaya mencerdaskan kehidupan bangsa, karena melalui pendidikan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat dapat diwujudkan. Pendidikan mempengaruhi secara penuh pertumbuhan ekonomi suatu Negara (daerah).

Pendidikan dapat menjadikan sumber daya manusia lebih cepat mengerti dan siap dalam menghadapi perubahan dan pembangunan suatu Negara. Masalah kualitas dan kuantitas sumber daya manusia jugadiakibatkan oleh rendahnya mutu pendidikan. Hal ini ditunjukkan oleh adanya tingkat melek huruf yang rendah, pemerataan pendidikan yang rendah, serta standar proses pendidikan yang relatif kurang memenuhi syarat.

Dalam mengkaji sistem pendidikan dalam suatu Negara tidak terlepas dari falsafah suatu bangsa tersebut. Ketika negara-negara barat mempunyai falsafah hidup rasionalis, materialis, dan pragmatis maka sistem pendidikan yang dibuat oleh barat tentu bercorak rasionalis, pragmatis, dan materialis. Falsafah bangsa Indonesia adalah Pancasila. Menurut Undang-undang Dasar 1945 .Pendidikan Nasional adalah pendidikan yang berakar pada kebudayaan bangsa Indonesia yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar1945.

Dalam penyelenggaraan pendidikan di tingkat nasional maupun daerah, negara Indonesia mengalami suatu transisi yang sangat signifikan dalam pengelolaan sumber-sumber daya yang ada dalam bidang pendidikan terutama dalam hal pendanaan pendidikan. Dalam hal ini pelaksanaan pendidikan harus disertai dengan adanya peningkatan peran sumber dana pendidikan.

Kebijakan politik pendidikan Indonesia secara umum dapat dibagi ke dalam empat periode. Pertama kebijakan politik pemerintahan pada masa Pra-kemerdekaan; Kedua, kebijakan politik pemerintahan Indonesia pada masa Orde Lama; Ketiga kebijakan politik pemerintahan Indonesia masa Orde Baru; dan keempat kebijakan politik pemerintahan Indonesia pada Orde Reformasi.

3. Suprastruktur dan Infrastruktur Sosial

- a. Komponen Dasar dari Sosio Kultur adalah Suprastruktur Ideologis, struktur Sosial dan Infrastruktur material.
- b. Struktur sosial masyarakat pada masyarakat umum, terdapat juga stratifikasi sosial, baik antar sesama maupun dengan etnis yang berbeda.
- c. Masih ada daerah tertentu tercipta pemisahan antara masyarakat bangsawan dengan masyarakat umum (biasa).
- d. Infrastruktur masyarakat masih banyak yang tradisional menggunakan teknologi yang relatif sederhana, Sehingga masyarakat tradisional selalu di identikkan dengan alam di mana mereka tinggal.
- e. Infrastruktur sosial seperti sarana pendidikan, dalam pembangunan dan pengoperasiannya membutuhkan subsidi atau bantuan dalam bentuk lain yang bersumber dari pemerintah (APBN, APBD dan DAU)

4. Suprastruktur dan Infrastruktur Pendidikan terhadap Budaya

Struktur masyarakat dibagi menjadi dua, yaitu Infrastruktur (basic) dan Suprastruktur (Superstruktur). Infrastruktur/Basic, ditentukan oleh dua hal, yaitu :

- a. Tenaga Profesional (komponen yang membentuk tenaga profesional terdiri dari perlengkapan kerja, kemampuan, pengalaman, dan teknologi yang digunakan.
- b. Hubungan dalam berproses (menjaga hubungan baik):saling pengertian, saling menerima kenyataan, saling menyesuaikan, memupuk rasa cinta, bermusyawarah, suka memaafkan, berperan serta untuk maju Bersama)

Suprastruktur terdiri dari 2 jenis, yaitu :

- a. Tatanan Kelembagaan (segala tingkat lembaga yang mengatur kehidupan ranah pendidikan, yang meliputi orientasi pendidikan, sistem pendidikan, sistem kesehatan warga sekolah/madrasah
- b. Tatanan kesadaran kolektif (berisi sistem kepercayaan, norma dan nilai yang memberikan kerangka pemahaman, makna dan orientasi spiritual) – dan dari Isi tatanan kesadaran kolektif ini terdiri dari pandangan praktisi, agamawan, filsuf, moralitas masyarakat, nilai-nilai budaya.

KESIMPULAN

Seiring berkembangnya perkembangan Polisosbud pada tahun 2021, maka Indeks Pembangunan Budaya harus memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang perkembangan budaya, meliputi tujuh dimensi, yaitu: (1) dimensi ekonomi budaya; (2) dimensi pendidikan; (3) dimensi ketahanan sosial budaya; (4) dimensi warisan budaya; (5) dimensi ekspresi budaya; (6) dimensi budaya literasi; dan (7) dimensi gender. Hasil perhitungan tahun 2018 menunjukkan bahwa nilai indeks pembangunan budaya secara nasional pada rentang 0-100 adalah 53,74. Nilai ini menunjukkan bahwa perkembangan kebudayaan Indonesia masih memerlukan masalah pembangunan yang signifikan dan harus terus dikembangkan. Superstruktur Polisosbud dan infrastruktur pendidikan merupakan tiga hal yang berkaitan erat dan saling mempengaruhi. Artinya bidang pendidikan memasukkan unsur politik dan budaya dalam membangun sarana dan prasarana pendidikan. Kebijakan sosial budaya adalah segala upaya, kebijakan, dan strategi yang berkaitan dengan suprastruktur dan infrastruktur pendidikan. Kebijakan pendidikan berkelanjutan adalah penjelasan atau pengertian umum dalam penyelenggaraan suprastruktur dan infrastruktur pendidikan yang ditentukan oleh otoritas pendidikan tertinggi dalam pembangunan kepolisian, masyarakat dan kebudayaan, yang mengarahkan pemikiran dan menentukan kegiatan dalam banyak kesamaan dengan alat pendidikan. dan keragaman. dan tujuan serta program yang akan dilaksanakan.

REFERENSI

- Abdulloh Hasyim, *Komunikasi Politik Media Pendapat Umum & Perubahan Ruang Politik*. Bandung: UIN Sunan Gunung Djati.
- Abdulloh, M.Q. (1996). *Teori Komunikasi Media Massa*.
- Bambang Sunggono. (1996). *Metode Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Budiardjo, Miriam (2008). *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama
- https://dinastirev.org/public/journals/3/pageHeaderLogoImage_en_US.png(16-12-2022)
- https://dinastirev.org/public/journals/3/pageHeaderLogoImage_en_US.png
- <https://nasional.kompas.com/read/2022/08/23/03080021>
- Jhon Eka Powa, As'as, Jamrizal, (2023). *Pengaruh Perkembangan POLESBUD Terhadap Penataan Suprastruktur dan Infrastruktur*. Journal of Social Science Riserch.
- Monica Ayu Caesar Isabela | Editor Nibras Nada Nailufar KOMPAS.com.<https://nasional.kompas.com/read/2022/02/01/01000051/suprastruktur-dan-infrastruktur-politik-indonesia>.
- Muhammad Kambali, (2020). *Pemikiran Karl Marx tentang Struktur Masyarakat (Dialektika Infrastruktur dan Suprastruktur)*. Jurnal Al-Iqtishod: Jurnal Pemikiran dan Penelitian, Vol 8 No.2.
- R. Panuju, (2010). *Jago Lobi dan Negosiasi*. Jakarta: Interprebook.
- Ramayulis, (2006). *Ilmu Pendidikan Islam*. Jakarta: Kalam Mulia.
- RJ Kodoatie, (2005). *Pengantar Manajemen Infrastruktur*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Soemardi dan Reini D, (2009), *Pembangunan Infrastruktur Untuk Semua*. Bandung: Prosiding Seminar Nasional.
- Suyanto, Lias Hasibuan dan Kasful Anwar Us. *Konsep Dasar Ekonomi Pendidikan Pada Tataran Suprastruktur dan Infrastruktur Politik di Indonesia*. Jurnal Manajemen Pendidikan dan Sosial (JMPIS). UIN STS Jambi 2023.

Syarifah, Ainun Hasibuan. (2020). *Kajian Pengaruh Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kota Pekanbaru*. R epository uir.ac.id

Wahid U, (2016). *Komunikasi Politik Teori Konsep Pada Era Media Baru*. Bandung: Simbiosis Rakatama Media.